

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Analisis Keputusan Etis Penyedia Barang dan Jasa di Kota Bandung ini dilakukan dengan menggunakan konsep strategi tender, strategi negoisasi dan 6 kompetensi etis. Penelitian ini ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan penelitian “Bagaimana penyedia barang dan jasa menentukan cara penyediaan barang dan jasa dalam E-Catalogue Lokal?”. Berdasarkan temuan dink, maka penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa penentuan cara penyediaan barang dan jasa dalam Katalog Lokal menggunakan tender dengan negosiasi.

Dalam proses tender, penyedia barang dan jasa **tidak menggunakan strategi kompetitif** karena tidak menampilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna katalog elektronik lokal dan ada kecurigaan penyedia barang dan jasa tidak berkompetensi dengan adil, jujur, dan transparan. Penyedia barang juga **tidak menggunakan strategi menurunkan harga** dan **strategi merugi** karena barang yang dicantumkan dalam Katalog Elektronik Lokal bukan merupakan harga terendah dengan kualitas yang sama. Namun penyedia barang dan jasa menggunakan **strategi pembayaran dengan kelonggaran** karena mau memberikan kelonggaran kepada PKK untuk membayar barang dan jasanya dan menggunakan **strategi perundingan di bawah meja** karena melakukan diskusi informal untuk menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Kemudian untuk menjawab “Strategi Negosiasi apa yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan dan Penyedia Barang dan Jasa?”, maka berdasarkan hasil temuan dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ketika menentukan nilai teknis dan harga dalam Katalog Lokal, dapat disimpulkan bahwa **ULP lebih mementingkan kepentingan masyarakat sedangkan penyedia barang dan jasa mementingkan kepentingan diri sendiri dan masyarakat.**

Selanjutnya untuk menjawab “Apakah keputusan pemilihan penyedia untuk E-Catalogue Lokal bersifat etis?”, maka berdasarkan hasil temuan dan analisa dapat disimpulkan bahwa keputusan pemilihan penyedia barang dan jasa untuk E-Catalogue terindikasi **tidak etis**. Hal itu dibuktikan dari sebagian besar unit Layanan Pengadaan memiliki kemampuan *advocacy skill* namun tidak memiliki keterampilan *problem identification skills* atau mengidentifikasi masalah, tidak memiliki keterampilan *problem solving skills*, tidak memiliki *kemampuan self-awareness* dan *concensus building*, tidak seutuhnya memiliki kemampuan *subject matter knowledge*, dan mayoritas staf di unit layanan pengadaan tidak memiliki *attitude and commitment*.

## 6.2 Saran

Saran yang dapat diusulkan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan temuan masih banyak penyedia barang dan jasa yang tidak mencantumkan informasi yang lengkap bagi pengguna E-Catalogue Lokal maka, sistem katalog elektronik lokal harus diperbaiki supaya jika ada penyedia

barang dan jasa yang tidak mencantumkan dokumen dengan lengkap maka tidak dapat mencantumkan barang dan jasanya di Katalog Elektronik Lokal.

- b. Berdasarkan temuan, harga yang dicantumkan di Katalog Elektronik Lokal bukan harga yang terendah maka Unit Layanan Pengadaan seharusnya melakukan survey harga pasar terlebih dahulu supaya dapat mempunyai kekuatan untuk mengetahui harga yang pas di E-Catalogue Lokal. Selain itu, melakukan strategi negosiasi dengan penyedia barang dan jasa.
- c. Berdasarkan temuan, banyak staf ULP yang tidak mengetahui adanya penyelewengan dan tidak memiliki kopetensi etis maka perlu diadakan program pelatihan mengenai perilaku etis dan membangun pola perilaku etika pengadaan barang dan jasa. Di dalam pelatihan tersebut diberikan pemahaman mengenai penalaran moral atau *system thinking*.
- d. Sosialisasi budaya kerja yang etis dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah
- e. ULP dan Penyedia Barang dan Jasa perlu membuat panduan etis sebagai *code of conduct* dengan berdasarkan 6 kompetensi etis

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Corvette, Barbara A.B.2018 *Conflict Management: A Practical Guide to Developing Negotiation Strategies*
- Creswell, John W. 2014. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 4rd*. California
- Direktorat Penelitian dan Pengembangan. 2018, Hasil Kajian Pencegahan Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Ibrahim, M.A. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Pontianak.
- Moleong. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Silalahi, Ulber. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. INDONESIA: PT REFIKA ADITAMA.
- Yin, R.K. 2009. *Case Study Research Design and Methods*. California.

### **Artikel Jurnal**

- Caroline Gratia Sinuraya, Tutik Rachmawati. 2016. "Does ICT Matters for Corruption." 50.
- Christos Manolopoulos, Christos Manolopoulos, Paul Spirakis, Yiannis C. Stamatou. 2011. "ICT and E-Governance: The Citizen's Trust Facet." In *Public Sector Using Information Technologies Transforming Policy into Practice*, by Panagiotis Kanelis Thomas Papadopoulos, 136. United States: IGI Global.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 4rd*. California: 32.
- Direktorat Penelitian dan Pengembangan. 2018. *Hasil Kajian Pencegahan Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa*.

- Direktorat Penelitian dan Pengembangan. 2014. *Kajian Pencegahan Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta: KPK.
- Endianingsih, D. 2015. "Peran E-Catalogue dalam Proses Pengadaan Elektronik." *Jurnal Kalibrasi* 5.
- Ervianto, Wulfram I. 2004. *Teori Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta: Andi.
- Heeks, Richard. 2003. "Most eGovernment for Development Projects Fail: How Can Risks be Reduced?" *iGovernment Working Paper Series* 2.
- Hilton, Whitton. 2019. "Developing the "Ethical Competence" of Public Officials - A Capacity - Building Approach." *Integrity Forum 16 Howard Whitton*. Diakses April 5, 2019. <https://www.oecd.org/cleangovbiz/Integrity-Forum-16-Howard-Whitton.pdf>.
- Lestiyorati, Jamila. 2018. "Analisis Permasalahan E-Purchasing Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja." *SNKN Simposium Nasional Keuangan Negara* 687.
- . 2016. *Petunjuk Penggunaan Aplikasi E-Katalog Produk Barang dan Jasa Pemerintah*. Agustus. Diakses Februari 8, 2019. <https://e-katalog.lkpp.go.id/files/upload/konten/Panduan/USER%20GUIDE%20e-Catalogue%20Penyedia.pdf>.
- World Bank, OECD-SIGMA, International Training Centre (ITC). 2017. "Procurement Management in Public Sector." *Procurement Management in the Public Sector (Goods, Works, and Services)*, October 9-27.
- Widaiiswara, Abu Sopian. n.d. "Strategi pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Barang/Jasa Pemerintah." 2.
- Widaiiswara, Abu Sopian. n.d. "Negosiasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa." 3
- Artikel Internet**
- Farsat. 2018. *Mengenal Sistem E-Catalogue dan E-Purchasing dalam Proses Pengadaan Sediaan Farmasi*. Diakses Maret 8, 2019. <https://gudangilmu.farmasetika.com/mengenal-sistem-e-catalogue-dan-e-purchasing-dalam-proses-pengadaan-sediaan-farmasi/>
- ICW. 2018. *Transparansi Pengadaan Pemerintah*. 15 Maret. Diakses Februari 8, 2019. <https://antikorupsi.org/id/news/transparansi-pengadaan-pemerintah>.

- Ilyasa, Bara. 2018. *Ini Kekurangan Sistem Katalog Elektronik Hasil Temuan BPK*. Diakses Maret 10, 2019 <http://www.teropongsenayan.com/38852-ini-kekurangan-sistem-katalog-elektronik-hasil-temuan-bpk>.
- Indonesia, Media. 2017. *E-Katalog Diklaim Tekan Korupsi*. April 20. Diakses Maret 10, 2019. <http://mediaindonesia.com/read/detail/101488-e-katalog-diklaim-tekan-korupsi> .
- LKPP. 2019. *Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah*.Diakses April 15, 2019. <https://lpse.lkpp.go.id/eproc4/publik/tentangkami>.
- . 2019.*Katalog Elektronik Lokal Kota Bandung*. <https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog-lokal-sektoral>
  - . 2019.*Petunjuk Penggunaan Aplikasi E-katalog Produk Barang dan Jasa Pemerintah*. <https://www.pengadaan.web.id/2019/07/tender-adalah.html>
- Malik, Alfian. 2019. *Pengadaan*. April 1. <https://www.pengadaan.web.id/2019/07/tender-adalah.html> .
- OECD. 2019. *Integrity Form 16 Howard Whitton*.Diakses April 8, 2019. <https://www.oecd.org/cleangovbiz/Integrity-Forum-16-Howard-Whitton.pdf>.
- Oxford College of Procurement & Supply. 2019. *The Benefit of E-Procurement* .Diakses Agustus 11, 2019 <https://www.oxfordcollegeofprocurementandsupply.com/the-benefits-of-e-procurement/>.
- Pengadaan. 2019. *Dengan E-Katalog, Pemerintah Tidak Harus Memilih Produk dengan Harga Terendah*.Diakses Februari 8, 2019. <https://www.pengadaan.web.id/2016/10/dengan-e-katalog-pemerintah-tidak-harus-memilih-produk-dengan-harga-terendah.html>.
- . 2018. *Tender Proyek Adalah: Arti, Persiapan, Persyaratan, dan Tahapan Mengikuti Tender*. <https://www.pengadaan.web.id/2019/07/tender-adalah.html>.
- Purchasing & Procurement. 2017. *Procurement Auction - Is It A Better Way to Buy Products*. <https://www.purchasing-procurement-center.com/procurement-auction.html>.
- Sustain. 2018. *Mengenal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik*. 27 Agustus. Diakses April 8, 2019. <http://sustain.id/2018/08/27/mengenal-pengadaan-barang-jasa-pemerintah-secara-elektronik/>.

The Indonesian Institute. 2017. *korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia.* Desember 6. Diakses Februari 8, 2019. <https://www.theindonesianinstitute.com/korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-di-indonesia/>.

## **Peraturan**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik